

BAB II

HUBUNGAN MYANMAR DAN UNITED WA STATE ARMY

Republik Serikat Myanmar merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Seringkali Myanmar dikenal dengan nama Burma, dimana nama tersebut diambil dari salah satu etnis yakni Burmese. Pada tahun 1989, junta militer selaku pemerintah utama disana mengganti nama dari Burma menjadi Myanmar untuk menjaga ketegangan antar etnis karena tidak semua etnis merupakan Burmese (BBC, 2007). Myanmar tergolong negara yang memiliki letak geografi strategis. Hal ini karena Myanmar berbatasan langsung dengan negara-negara yang tingkat ekonominya cenderung tinggi dan aktif dalam melakukan kegiatan ekspor – impor seperti China dan Thailand dan juga berada dalam naungan organisasi regional yang cukup berpengaruh yakni ASEAN.

A. Gambaran Singkat Myanmar

Seperti mayoritas negara pada umumnya, Myanmar mengawali kehidupan bernegaranya dengan pola pemerintahan dinasti (kerajaan). Dinasti Pagan merupakan kehidupan kerajaan pertama dan yang paling terkenal dibanding lainnya. Memegang kekuasaan atas Myanmar selama 451 tahun, dinasti Pagan merupakan pusat dari kekuatan Myanmar saat itu. Kehidupan Myanmar yang pada saat itu sedang terpecah belah pun berhasil disatukan sebagai sebuah perserikatan dengan Pagan sebagai kerajaan pusatnya. Pasca kerajaan Pagan runtuh, dinasti-dinasti lain mulai bermunculan seperti Ava dan Toungoo. Namun kekuatan dinasti

mereka tidak cukup kuat untuk membendung ancaman kolonialisme yang datang dari berbagai arah seperti China, India dan Inggris.

A.1 Sejarah Negara Myanmar

Seperti negara pada umumnya, Myanmar mengalami begitu banyak perang dan sejarah kolonisasi sebelum berhasil menjadi negara yang berdaulat. Jejak kolonisasi tersebut dimulai sejak perang Anglo Burmese yang pertama pada tahun 1824-1826. Perang tersebut terjadi antara Inggris dan Burma yang memperebutkan wilayah Rakhine yang berada di perbatasan Manipur India, dimana saat itu India tengah dikuasai oleh Inggris. Perang pun berakhir dengan kekalahan serta kehilangan Myanmar atas kekuasaan daerah Rakhine. Kolonisasi Inggris tidak berhenti sampai disitu, perang Anglo-Burmese kedua terjadi 26 tahun kemudian, tepatnya pada 1852. Mencoba memperluas wilayah jajahannya, Inggris memperebutkan daerah pesisir Myanmar, yang berada tepat di sekitar Rakhine. Untuk kedua kalinya aneksasi berakhir dengan kemenangan Inggris. Daerah selatan Myanmar sudah sepenuhnya berada dalam kekuasaan Inggris.

Kolonisasi penuh Inggris atas Myanmar terjadi pada tahun 1885, pasca perang Anglo – Burmese yang ketiga. Inggris berhasil memasuki kawasan Myanmar dan menguasainya selama 63 tahun. Langkah pertama kolonisasi tersebut diawali dengan pendudukan Mandalay, sebuah kawasan di utara Myanmar. Tujuan Inggris dalam menaklukan wilayah Myanmar tersebut tidak lain adalah menjadikannya sebagai bagian dari koloni dan membuatnya menjadi salah satu provinsi dari India. Kolonisasi yang dilakukan Inggris tersebut menciptakan

banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat Myanmar. Penghapusan monarki, pemisahan agama dari pemerintahan dan penghancuran kantor-kantor keagamaan menjadi luka tersendiri bagi masyarakat Myanmar karena hal itu dianggap sebagai pilar yang selama ini mendasari kehidupan sosial budaya di Myanmar (Steinberg, Aung, & Thwin, 2017).

Hal pertama yang dilakukan Inggris dalam kedudukannya di Myanmar adalah mengganti sistem pemerintahan secara sepihak, berdasarkan keputusan dan pertimbangan Inggris semata. Oleh karena itu, pada masa kolonisasi masyarakat Myanmar tidak berhenti melakukan perlawanan terutama yang berasal dari golongan elit pemerintahan dan militer karena mereka menjadi korban pertama dalam kolonisasi Inggris. Berbagai gerilya dilakukan oleh masyarakat Myanmar hingga kesempatan untuk merdeka muncul di era perang dunia kedua. Diawali dengan adanya tawaran dari pemerintah Myanmar untuk menjadi aliansi bagi Inggris selama perang, Myanmar berhasil mendapatkan kemerdekaannya setelah bernegosiasi di London pada tahun 1947. Inggris setuju untuk meninggalkan kawasan yang dianggap persemakmuran Inggris tersebut.

Pada Januari 1948, Myanmar mendeklarasikan diri sebagai negara yang beradulat. Dengan pemerintahan baru, Myanmar menghapuskan jejak-jejak Jenderal Aung San dan Rance sebagai tokoh negosiator kemerdekaan Myanmar. Semenjak hilangnya tokoh demokrasi seperti Aung San, Myanmar menjadi salah satu negara yang dianggap gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh militer untuk menduduki kepala negara dan pemerintahan Myanmar. Selama beberapa dekade Myanmar terus dibayangi oleh

teror dan angka perlindungan hak asasi manusia pun dapat dikatakan mencapai titik kritis, hingga dunia internasional merespon dengan memberikan sanksi atau tekanan agar terjadi perubahan dalam kehidupan bernegara di Myanmar. Pada bulan Mei 1997 Amerika Serikat memberlakukan sanksi atas semakin kritisnya angka pelanggaran HAM di Myanmar. Sanksi tersebut berupa larangan investasi dari masyarakat US ke wilayah Myanmar yang terus berlanjut hingga ketahap ekonomi mikro yakni pelarangan impor semua produk dari Myanmar dan bahkan pelarangan visa bagi beberapa orang Myanmar untuk memasuki Amerika (Liaqat & Sayre, 2016). Seiring berjalannya waktu, sanksi telah dicabut dari Myanmar, namun dunia masih memperhatikan Myanmar baik itu dari segi demokrasi maupun tingkat pelanggaran hamnya.

A.2 Ekonomi

Perekonomian Myanmar sejak era dinasti telah memiliki banyak kesempatan untuk berkembang. Hal ini erat kaitannya dengan posisi geografis Myanmar yang strategis. Myanmar merupakan negara yang dilewati banyak jalur perdagangan seperti China dan India. Sejak era dinasti, kapal-kapal dari India, Sri Lanka berlabuh dari Teluk Thailand hanya untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Pasca kemerdekaan diraih dari Inggris, perekonomian Myanmar pun tetap memiliki kesempatan yang besar untuk maju. Hal ini berhubungan dengan jalur perdagangan China ke dunia yang lebih dikenal dengan OBOR (One Belt One Road). Jalur perdagangan ini melingkupi 65 negara dan Myanmar menjadi salah satu negara yang dilewati jalur perdagangan maritim China (The Sydney Morning

Herald, 2017). Terlebih, China saat ini merupakan salah satu negara yang perekonomiannya kuat, tentu saja menjadi jalur penghubung untuk rute perdagangannya bisa menjadi sangat menguntungkan bagi Myanmar. Myanmar dapat meraih keuntungan dari berbagai aspek seperti pajak, investasi atau bahkan distribusi melalui keberadaan jalur perdagangan tersebut. Namun, walau Myanmar telah lama memiliki sejarah yang cukup lama untuk menjadi gerbang perdagangan bagi daerah Barat menuju Asia Tenggara maupun sebaliknya, Myanmar belum memenuhi kecukupan ekonomi untuk bersaing dengan negara-negara disekitarnya. Tercatat dalam Asian Development Bank, tingkat pengangguran di Myanmar bahkan mencapai 25,6 % (Asian Development Bank, 2017).

A.3 Sosial Budaya

Jumlah populasi di Myanmar cenderung kecil jika dibandingkan dengan negara-negara disekitarnya yakni 55 juta jiwa (CIA, 2017). Jumlah tersebut pun tidak menyebar secara merata di kawasan Myanmar. Karena mayoritas mata pencaharian masyarakat berada di bidang agrikultur, masyarakat Myanmar memilih untuk tinggal di daerah yang subur seperti sepanjang sungai Irawaddy, sementara lainnya berada di kawasan pesisir yang memungkinkan mereka untuk mencari sumber pendapatan dari mencari ikan atau hasil laut. Daerah utara Myanmar merupakan daerah yang cenderung ekstrim untuk ditinggali, karena terdiri dari banyak pegunungan yang cenderung menimbulkan pandangan isolasi. Oleh karena itu, distribusi populasi masyarakat Myanmar lebih berfokus di selatan daripada kawasan utara.

Perdagangan yang terjadi di masa lampau telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Myanmar. Pada era dinasti, perdagangan lebih banyak berasal dari kawasan India yang lekat akan agama Hindu Budha. Hal ini menjadikan Myanmar sebagai negara pemeluk agama Budha pertama dikawasan Asia Tenggara pada masa itu, dan hingga kini agama Budha merupakan agama mayoritas di negara tersebut dengan jumlah mencapai 87,9% (CIA, 2017). Agama Buddha yang diterapkan oleh mayoritas masyarakat Myanmar merupakan Theravada Buddhism, dimana merupakan cabang ajaran tertua, yang lebih menekankan ketaatan ketat pada kode monastik. Melekatnya agama Budha dalam kehidupan Myanmar menjadikan komunitas keagamaan memiliki peran tersendiri dalam perpolitikan. Sebagai contoh, Sangha, sebuah komunitas monastik Buddhis, selain menerima persembahan dari masyarakat Myanmar, juga dinilai mampu memberikan legitimasi pada kekuasaan negara bahkan menentang kekuasaan negara (Harvard Divinity School, 2017).

B. Transformasi Politik Myanmar

Myanmar telah mengalami berbagai perubahan sistem politik mulai dari demokrasi hingga authoritarian. Pada awal pasca kemerdekaan, demokrasi sempat merebak menjadi hal yang diimpikan masyarakat Myanmar. Berdasarkan inisiasi Jenderal Aung San sebelum kematiannya di tahun 1947, Myanmar berkembang menjadi negara republik yang menerapkan sistem demokrasi parlementer (Clerk 1994 dalam Keling, Saludin, Feigenblatt, Ajis, & Shuib, 2010). President pertama Myanmar, Sao Shwe, bersama dengan Perdana Menteri U Nu berhasil menciptakan

situasi politik yang pro demokrasi. Banyak partai politik yang bermunculan dan menandai persiapan demokrasi di Myanmar seperti partai AFPFL (Anti Fascist People Freedom League). Namun proses demokrasi tersebut hanya dapat berjalan selama 14 tahun dan harus berhenti karena adanya *coup d'état*¹ yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962 . Jenderal Ne Win memanfaatkan kondisi Myanmar yang sedang berada di ambang kemiskinan dan *stagnant* dalam pembangunan untuk membangun opini masyarakat yang menyalahkan sistem pemerintahan U Nu. Kondisi Myanmar tersebut pun didukung oleh permasalahan etnis. Kerusuhan etnis menjadi permasalahan utama yang terjadi di era-era awal kemerdekaan. Etnis-etnis di Myanmar berupaya meraih otonomi dan kemerdekaan atas wilayah-wilayah yang ditempatinya sejak Myanmar masih berupa negara-negara bagian terpisah (O'Hara & Selling, 2012). Hingga tahun 1960-an, kerusuhan etnis terus terjadi dan meluas ke berbagai wilayah. Pemerintah Myanmar saat itu dinilai tidak mampu untuk meredam kerusuhan dan menuai banyak kritik. Besarnya rasa frustrasi dan kekecewaan masyarakat Myanmar tersebut menciptakan situasi kacau balau di kancah internal, hingga U Nu memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi pemerintahan dan meminta Jenderal Ne Win memperbaiki kondisi Myanmar pada 1958.

Jenderal Ne Win memerintah Myanmar dengan cara yang berbeda, dalam waktu singkat, hanya 2 tahun sebelum pemilihan umum dilangsungkan kembali, kekuatan militer dibangun begitu kokoh dan berhasil memperbaiki kacaunya politik

¹ Coup d'état merupakan istilah dari kudeta atau kegiatan menggulingkan pemerintahan yang sedang menjabat

ekonomi. Hal ini membuka kesempatan untuk Ne Win memenangkan pemilihan umum di tahun 1960. Namun rupanya, U Nu tetap memenangkan pemilihan tersebut dengan perolehan suara sekitar 60%. Kemenangan U Nu inilah yang memicu pergolakan dan *coup d'état* hanya 2 tahun pasca pemilihan umum yakni 1962. Myanmar kemudian selama beberapa dekade mengalami kehidupan politik yang otoriter dimana militer dan aksi bersenjata menjadi solusi atas masalah yang terjadi.

Jenderal Ne Win menjabat sebagai kepala pemerintahan Myanmar pada tahun 1962 dan berniat menyelamatkan Myanmar dari ancaman perpecahan di kala itu. Ne Win menerapkan sistem pemerintahan yang berallawanan dengan U Nu yakni sosialis demokrasi, dimana menitik beratkan kekuasaan militer sebagai media dalam politik. Arah sistem politik Ne Win tersebut bagai pisau bermata dua. Disisi masyarakat, kebebasan demokrasi tentu terkekang , dimana partai politik dilarang eksistensinya, sistem parlementer dihapus dan hak-hak asasi masyarakat di perketat (Keling, Saludin, Feigenblatt, Ajis, & Shuib, 2010). Namun disisi lain, arah politik sosialis ini cenderung solutif untuk meredam permasalahan etnis. Kebijakannya yang terkenal yakni “*Burmese Way to Socialism*” dan “*Four Cuts Strategy*” (O'Hara & Selling, 2012). Sosialisme yang diterapkan oleh Ne Win saat itu dinilai menjadi solusi terbaik untuk mengatasi adanya ancaman perpecahan karena adanya “invisible hand” yang akan menjadi pusat untuk penyelesaian masalah. Semua aspek kenegaraan akan dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Tidak hanya sampai disitu. Ne Win juga melakukan kebijakan yang cukup keras untuk

menghadapi langsung etnis-etnis yang menuntut otonomi serta kemerdekaan itu melalui *Four Cuts Strategy*.

Kebijakan *Four Cuts Strategy* tersebut bertujuan memotong langsung hubungan antara etnis bersenjata dan masyarakat umum dengan pelarangan di 4 aspek yakni distribusi makanan, keuangan, perekrutan dan intelijen (Tom 2005 dalam O'Hara & Selling, 2012). Namun, hasil dari kebijakan sosialis yang diterapkan Ne Win rupanya berjalan tidak seperti yang diharapkan. Jika pada awalnya gerakan kerusuhan dan protes hanya berada di kawasan yang diduduki etnis bersangkutan, kini masyarakat Myanmar keseluruhan melakukan protes atas pertanggung jawaban pemerintah. Ide-ide sosialis yang diterapkan oleh Ne Win menciptakan penurunan tingkat ekonomi Myanmar yang menyebabkan banyak masyarakat jatuh lebih dalam menuju kemiskinan. Kerusuhan yang terjadi di Myanmar ini memunculkan Jenderal Saw Maung sebagai kepala pemerintahan baru di Myanmar.

Jenderal Saw Maung merupakan asisten dari pemerintahan Ne Win. Tidak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya, Saw Maung menekankan kekuatan militer sebagai alat kontrol utama perpolitikan di dalam negeri. Pembentukan SLORC (State Law and Order Restoration Council) ini pun menjadi salah satu kebijakan yang kontroversial bagi masa pemerintahannya. Pembentukan SLORC ini pada awalnya ditujukan sebagai media untuk mengontrol anarki dan memenangkan dukungan publik (Keling, Saludin, Feigenblatt, Ajis, & Shuib, 2010). Namun pada eksekusinya, SLORC bertindak sebagai pihak berkuasa yang sewenang-wenang. Dengan kekuatan militernya, SLORC dapat dengan mudah

menentukan pidana bagi seseorang tanpa melalui pengadilan yang jelas, bahkan tak jarang penyiksaan yang berujung pada kematian juga menjadi akhir dari aksinya. Walau penuh kontroversi tersebut, Jenderal Saw Maung menjalankan periode masa jabatannya dengan baik hingga berganti menjadi Jenderal Khin Nyunt.

Era pemerintahan Jenderal Khin Nyunt, api-api demokrasi yang telah berkobar di zaman dahulu muncul kembali. Namun transisi demokrasi di Myanmar tidak semudah beralih dari otoriter ke demokrasi. Aspek politik, ekonomi dan sosial di Myanmar juga harus cukup kuat untuk menjalankan sistem demokrasi liberal. Myanmar, walau sudah berdaulat masih dinilai begitu kosong untuk mampu menerapkan demokrasi, ditambah parlemen yang seharusnya mendukung telah diputar arah kesetiannya untuk berada di pihak pemerintah militer otoriter (Clapp, 2007). Keadaan ini yang menyebabkan adanya pergolakan demokrasi di era 1990, dimana pemilihan umum demokratis pertama di suarakan oleh tokoh Aung San Suu Kyi.

Pada tahun 1990, terdapat pertarungan politik antara pemerintahan militer dan NLD (*National League for Democracy*) yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi. NLD pada awalnya merupakan partai yang digunakan untuk oposisi SLORC pada tahun 1988, namun NLD pun menjadi tonggak pertama bagi perkembangan ulang demokrasi di Myanmar pasca junta militer. Pemilihan umum yang terjadi saat itu dimenangkan oleh NLD dengan total raihan suara 80% kursi di parlemen (Clapp, 2007). Tetapi terjadi intrik antar pemerintahan militer saat itu sebagai alasan penundaan serah terima kekuasaan pada NLD. Pemerintah militer saat itu (SLORC) mengharuskan sebelum adanya pemindahan kekuasaan pada pemenang

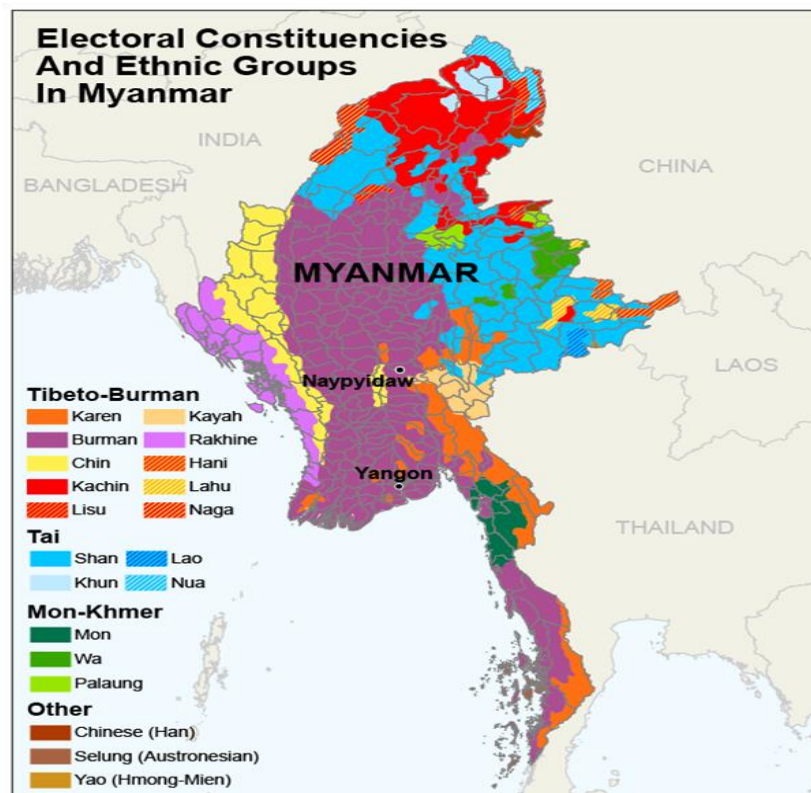
pemilihan umum, sebuah konstitusi harus dibuat untuk memperkuat status quo negara. Persyaratan konstitusi yang diminta oleh pemerintahan militer saat itu didukung oleh dunia internasional baik kawasan Asia, bahkan Eropa (Taylor, 2006). Permintaan ini pun didukung oleh Aung San Suu Kyi sebagai perwakilan dari pihak pemenang pemilihan umum 1990.

Konstitusi tersebut lalu disusun selama hampir 15 tahun. Namun di tahun 2007, konstitusi yang telah lama dirancang itu gagal disusun dan berlanjutlah masa-masa pemerintahan militer di Myanmar. Dunia Internasional telah memberikan tekanan pada Myanmar terkait permasalahan demokrasi ini. Bahkan China secara tegas meminta Myanmar untuk lebih demokratis dan Amerika Serikat meminta isu ini diangkat menjadi isu regional sehingga bisa ditindaklanjuti (Clapp, 2007).

Demokrasi baru bisa dirasakan pada tahun 2015, dengan NLD memenangkan setengah dari kursi di parlemen (Al Jazeera, 2017). Pemilihan umum pada tahun 2015 jauh lebih demokratis daripada yang sebelumnya dan pemindahan kekuasaan berlangsung dengan cukup singkat. Kini Htin Kyaw menjadi presiden demokratis dari Myanmar. Walau demokratisasi telah menemukan titik terang dalam kehidupan bernegara Myanmar, konflik etnis masih menjadi permasalahan penting yang hingga kini dibahas oleh pemerintah Myanmar. Permasalahan Rohingnya di tahun 2017 pun menjadi salah satu bukti dan tantangan khusus bagi demokratisasi di Myanmar karena merupakan hal yang mencengangkan dan mencoreng nama Aung San Suu Kyi sebagai pelopor demokrasi di Myanmar. Tidak berhenti sampai disitu, permasalahan etnis lain

masih menjadi pekerjaan rumah bagi demokrasi Myanmar, baik mengenai posisi atau hierarki antar etnis maupun perang sipil yang tengah terjadi hingga kini.

C. Konflik Etnis dan United Wa State Army



Gb. 2.1 Electoral Constituencies And Ethnic Groups in Myanmar (Palma, 2015)

Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki diversitas etnis yang cukup tinggi. Berbagai ras dari kawasan disekitarnya melakukan migrasi dan menetap di Myanmar. Terdapat setidaknya 3 gelombang migrasi ras yang terjadi dari luar ke dalam Myanmar (Cocks, 1919). Gelombang migrasi pertama dilakukan oleh Ras Mun dan Talaing, dipercaya menjadi ras tertua di Myanmar, merupakan cabang dari ras Mon – Khmer dari dataran China. Ras Mun dan Talaing menempati wilayah tepian sungai di Myanmar seperti Irawaddy. Lalu, gelombang migrasi

kedua dilakukan oleh Tibeto-Burman. Ras Tibeto – Burman berpindah dari timur Tibet, dan keturunannya kini menjadi ras Chin, Kami dan Burmese, dimana merupakan salah satu ras yang dipandang kedudukannya oleh pemerintah Myanmar. Sementara itu, ras terakhir yang melakukan perpindahan adalah ras Kachin. Mereka adalah ras yang dikenal suka berperang, dan melakukan perpindahan dari Assam India. Keberadaan ras-ras lainnya seperti Tai dan Shan sulit untuk diteliti lebih lanjut asal-usulnya. Namun keberadaan mereka sudah ada pasca gelombang migrasi yang kedua (Cocks, 1919).

Keberagaman asal-usul etnis ini menciptakan Myanmar sebagai wilayah yang sulit untuk bersatu. Sejak era kolonialisme, Myanmar telah terbagi-bagi menjadi 7 negara bagian yang mewakili masing-masing etnis minoritas terbanyak. 7 negara tersebut ialah Shan, Karen, Karenni, Arakan, Chin, Kachin dan Mon (Clapp, 2007). Hidup bersama dengan 135 etnis berbeda, Myanmar kini berada dalam teror konflik antar etnis. Konflik ini telah terjadi cukup lama, bahkan semenjak Myanmar meraih kemerdekaannya dari Inggris. Pemerintah Myanmar saat itu mencoba meredakan tuntutan otonomi wilayah para etnis dengan mengadakan perjanjian Panglong. Perjanjian itu merupakan langkah pertama pemerintah Myanmar dalam melakukan rekonsiliasi nasional. Perjanjian Panglong diinisiasi oleh Jenderal Aung San sebagai pemegang kekuasaan Myanmar saat itu dan merupakan hasil dari pengaruh otonomi yang Inggris kemukakan pada *The British White Paper 1945*. *British White Paper* merupakan sebuah dokumen yang membahas mengenai status Burma dimasa depan, yang menyatakan dukungan

Inggris mengenai pemberian hak otonomi terhadap masyarakat yang berada di kawasan perbatasan (Walton, 2008).

Perjanjian Panglong memang cukup berhasil untuk mengikat beberapa etnis yang besar dan terkenal sebagai kelompok pemberontak. Namun, perjanjian Panglong tidak sepenuhnya mampu mengatasi dan meredam konflik etnis yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan hanya beberapa etnis yang berpartisipasi dalam perjanjian yakni Kachin, Chin dan Shan (UN Peacemaker, 1947). Adanya perbedaan pandangan mengenai kemerdekaan dan perserikatan juga menjadi alasan untuk tidak efektifnya perjanjian Panglong. Etnis partisipan memiliki ide-ide mengenai kemerdekaan dan terbebas dari otonomi Myanmar. Namun, perjanjian Panglong mengatur mengenai adanya pembentukan negara federal dimana semua negara bagian etnis memiliki otonominya sendiri, tetapi masih menjadi bagian dari Myanmar (Clapp, 2007).

Keberhasilan kecil yang diraih dalam perjanjian Panglong pun tidak bisa bertahan lama. Hal ini berkaitan dengan kematian Jenderal Aung San yang dianggap sebagai inisiator perdamaian. Aung San dan 6 anggota kabinetnya dibunuh di Rangoon pada bulan Juli 1947, dimana U Saw, perdana menteri Burma pertama, dinyatakan bersalah sebagai tersangka pembunuhan (Oxford Burma Aliances, 2017). Kematian Aung San menjadi penanda awal atas runtuhnya semangat rekonsiliasi yang sudah terbangun di perjanjian Panglong karena perjanjian yang telah sukses dibangun menjadi hilang dan terabaikan. Pemerintahan selanjutnya tidak memiliki kuasa untuk merealisasikan isi perjanjian tersebut dan menyebabkan adanya protes dari kelompok-kelompok etnis yang menandatangani

perjanjian tersebut. Pemberontakan dari berbagai faksi komunis dan kelompok etnis pun muncul selama berbulan-bulan dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaannya dari Myanmar (Walton, 2008). Keamanan negara tidak lagi terkontrol karena konflik terjadi dimana-mana, merujuk pada tidak ada realisasi lebih lanjut dari Perjanjian Panglong. Bahkan wilayah pihak yang menjadi partisipan perjanjian Panglong pun mengalami gejolaknya sendiri, berhubungan dengan tidak adanya kejelasan tersebut. Perjanjian Panglong seakan terkubur bersama dengan kematian Jenderal Aung San, sang inisiator. Pemerintah Myanmar pun terus berupaya untuk meredam konflik tersebut dengan berbagai kebijakan. Hingga pada tahun 2004, terdapat peluang yang cukup besar untuk menyukseskan rekonsiliasi di Myanmar. Hal ini disebabkan oleh pertemuan yang terjadi antara KNU (Karen National Union) dan Jenderal Than Shwe (Ketua State Peace and Development Council Myanmar). KNU memegang catatan pemberontakan terlama di Myanmar, kehadirannya diharapkan dapat membawa sedikit titik terang untuk perdamaian etnis di Myanmar. Tetapi pertemuan untuk gencatan senjata tersebut belum membuahkan hasil. Dibuktikan dengan masih adanya bentrokan antara pemerintah dan KNU pada November 2004 dan Januari 2005 (Taylor, 2006).

Jatuhnya perdana menteri Myanmar, Jenderal Khin Nyunt pada 2004 pun merupakan tanda bahwa perdamaian masih jauh dari harapan (Jagan, 2006). Ia merupakan Jenderal yang terkenal menjunjung tinggi nilai demokratis. Oleh karena itu ia memiliki oposisi yakni SPDC karena memiliki pandangan yang berbeda untuk memecahkan permasalahan konflik etnis di Myanmar. Berbeda dengan Nyunt, Than Shwe sebagai pemimpin SPDC memiliki pandangan bahwa konflik etnis

dapat diselesaikan jika pemerintah hanya berdiam diri, memperkuat peran militer untuk mempertahankan *status quo* (Jagan, 2006). Jenderal Khin Nyunt dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perdamaian di Myanmar. Ia merupakan kontak utama bagi etnis karena etnis-etnis tersebut mempercayainya dan menaruh kesetiaan padanya. Kesetiaan tersebut dibangun karena selama ini ia mengerti dan memahami kebutuhan dan hak para etnis. (Jagan, 2006). Konvensi Nasional pun diinisiasi oleh Nyunt, dimana dalam draft menyatakan bahwa setiap etnis harus bersedia menyerahkan persenjataannya, karena walaupun mereka sudah terikat pada perjanjian gencatan senjata sebelumnya, mereka masih memiliki persenjataan mandiri (Jagan, 2006).

Pada bulan Juli 2004, Sesi pertama perumusan konvensi dimulai dengan 17 etnis mengajukan permintaan mengenai keberadaan kekuatan bersenjata dalam wilayah etnis terkait. Semua berjalan lancar hingga pada Oktober 2004 Jenderal Khin Nyunt dipaksa mundur dari jabatannya dan menjadi tahanan rumah semenjak ada tuduhan korupsi dari pihak oposisinya. Perumusan draft konvensi nasional baru dimulai kembali pada akhir tahun 2005 dengan pembahasan pembagian kekuasaan eksekutif dan yudisial (Human Right Watch, 2008). Dihadiri oleh 98% delegasi, proses perumusan draft konvensi nasional pun berjalan lancar dan menjadi acuan dasar untuk perumusan naskah kenegaraan berikutnya yakni konstitusi.

Konstitusi Myanmar tahun 2008 merupakan konstitusi pertama yang disusun berdasarkan nilai-nilai demokrasi, yang juga sering dinilai sebagai era keemasan bagi etnis-etnis minoritas. Keberadaan etnis Wa dalam perpolitikan Myanmar pun mulai terlihat semenjak dicetuskannya konstitusi Myanmar 2008

tersebut. Pada Bagian 2 Konstitusi, terkait dengan struktur kenegaraan, etnis Wa disebutkan mendapat 6 kota di wilayah negara bagian Shan sebagai wilayah otonominya. Wilayah tersebut dijelaskan pada poin 56 konstitusi yang meliputi kota Hopang, Mongma, Panwai, Metman dan Pangsang (Pankham) (Ministry of Information Myanmar, 2008). Etnis Wa pun menyambut konstitusi ini dengan baik, hingga membuatnya digolongkan sebagai salah satu “*ceasefire group*”, kelompok yang minim konflik karena berjalan sesuai dengan arahan pemerintah yang berkuasa.

Walaupun tergolong sebagai “*ceasefire group*”, etnis Wa tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah Myanmar. Hal ini karena etnis Wa tidak sepenuhnya terikat dan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah Myanmar. Sebagai salah satu etnis nasionalis, mereka memiliki prioritas sendiri mengenai pembangunan di dalam negara bagian Wa (Kramer, 2007). Ketidakpaduan antara pemerintah Myanmar dan etnis Wa ini ditunjukkan pada tahun 2010 sebelum pemilihan umum terjadi. Pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar memang memicu banyak penolakan terutama oleh golongan etnis baik bentuk partai maupun bersenjata. Kelompok-kelompok etnis berargumen bahwa bentuk pemerintahan baru tidak menjamin untuk akan bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak etnis, oleh sebab itu mereka tidak akan berpartisipasi pada pemilihan umum yang akan membawa masa depan yang buruk (Smith, 2010)

Ditengah pergolakan penolakan yang terjadi, pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan berupa *Border Guard Force* (BGF) pada bulan April 2009 (Smith, 2010). Kebijakan ini merupakan salah pendekatan militer yang dikeluarkan

oleh pemerintah saat itu, dengan mentransformasi kelompok etnis yang tergolong “*ceasefire groups*” menjadi batalion BGF. Kebijakan tersebut memicu konflik bersenjata meletus kembali di wilayah-wilayah tertentu, karena dengan bertransformasi menjadi BGF, kelompok etnis tersebut harus berakhir dan menjadi individual. Walaupun mengalami banyak penolakan, pemerintah Myanmar masih mencoba menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka mengurangi ketegangan etnis yang belum juga menemui titik akhir. Sebagai contoh spesifik, pemerintah Myanmar mengirim pasukan ke wilayah Kokang untuk mencerai-beraikan kelompok agar tergabung ke BGF. Sebagai hasilnya, 200 orang mati dan terluka, dan sebanyak 37.000 penduduk mengungsi ke dataran China (Smith, 2010). Tetapi walau banyak konflik terjadi antara pemerintah dan etnis terkait kebijakan BGF, etnis wa seperti memiliki imunitas tersendiri. Etnis Wa merupakan etnis yang memiliki kekuatan militer terbanyak dibanding etnis lainnya, dengan dengan total 20.000-30.000 tentara (Kuppuswamy, 2013), sangatlah potensial apabila pemerintah Myanmar dapat menaklukkannya dan membuat kekuatan tersebut beralih ke BGF. Namun nampaknya pemerintah Myanmar memiliki argumen tersendiri, bahwa dengan kekuatan seperti itu, etnis Wa akan dengan mudah menolak keputusan militer apapun, yang mengindikasikan kecilnya peluang untuk dengan mudah menaklukkan kekuatan etnis tersebut.

Selain di bidang militer, hubungan antara etnis Wa dan pemerintah Myanmar pun kritis di ranah politik. Di tahun 1989, etnis Wa membentuk sebuah partai bernama United Wa State Party (UWSP) sebagai bagian dari Communist Party of Burma (CPB) dan UWSA dibentuk sebagai bagian perlindungan untuk

partai tersebut dengan menjadi kekuatan militernya (Simms, 2017). CPB merupakan ancaman yang cukup besar bagi pemerintah Myanmar pada era tahun 1900an. Tergabung di dalam Anti-fascist People's Freedom League (AFPFL), sebuah aliansi partai besar di Myanmar, CPB memiliki kekuatan untuk melawan pemerintahan, namun tetap dalam bentuk yang tersembunyi (Aung, 2013) Setelah CPB runtuh pada Maret 1989, etnis Wa bangkit mengambil alih markas di Panghsang perbatasan China, menjadi kekuatan baru bagi komunis Burma (Pike, 2015). Oleh karena itu, eksistensi etnis Wa tersebut membuat ketakutan baru bagi Myanmar akan adanya pengaruh komunis dan konflik yang menyertainya.

Sementara itu, bidang terakhir yang menjadikan hubungan antara etnis Wa dan pemerintah Myanmar cenderung kritis adalah ekonomi dan keamanan. Etnis Wa tinggal di daerah pegunungan, sepanjang perbatasan antara Myanmar dan China dalam kawasan *Shan State* yang sejak pemerintahan Inggris dikenal sebagai wilayah yang tidak ranah dan tidak pernah terjamah (Mong, 2007). Terpencilnya wilayah Wa ini menyebabkan pemerintah Inggris menetapkan negara bagian Wa sebagai no-man's land yang bahkan keberadaannya ditolak oleh pemerintahan negara bagian Shan (daerah Wa termasuk dalam negara bagian Shan) dari tahun 1948 hingga 1962 (Mong, 2007). Namun, tanpa diduga, keberadaan etnis Wa yang terabaikan dari pemerintahan pusat tersebut menjadi semacam *boomerang* bagi Myanmar. Termasuk dalam kawasan opium terbesar kedua di dunia, *Golden Triangle*, etnis Wa mulai membangun citra baru yang mengancam pemerintahan Myanmar. *Golden Triangle*, merupakan sebutan untuk suatu kawasan pertemuan 3 negara (Thailand, Myanmar dan Laos) yang terkenal akan produksi opiumnya.

Terkenal dengan kesuburan tanahnya karena berada dalam kawasan sungai Mekong, *Golden Triangle* meraih predikat sebagai pemasok opium terbanyak kedua setelah Afghanistan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2014). Keberadaan opium dikawasan ini telah ada sejak 1800-an, saat perang opium antara China dan Inggris berlangsung (Alcohol Rehab, 2017).

Etnis Wa pun memanfaatkan kesempatan daerahnya tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama. Sebanyak 5-10 persen kebutuhan heroin didunia disupply dari kawasan *Golden Triangle*. Opium yang dihasilkan di *Golden Triangle* dijual dalam bentuk berbeda-beda sesuai dengan permintaan seperti heroin dan metamphetamine. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai jual dari opium itu sendiri. Jumlah 5-10 persen diatas dihitung dari hasil pembagian antara total heroin (jenis yang paling banyak beredar) di pasar global dan produksi yang dihasilkan *Golden Triangle*. Total jumlah heroin yang terdapat didalam pasar global kini mencapai 430-450 ton, heroin Myanmar dan Laos menyumbang sekitar 50 ton dari jumlah keseluruhan tersebut (UNODC, 2017). Diperkirakan dari jumlah tersebut, keuntungan yang diperoleh bagi para petani opium di *Golden Triangle* bisa mencapai 16,3 juta USD (CNN, 2014), yang dimana cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kawasan perbatasan. Etnis Wa biasanya membawa opium seberat 1.63 hingga 8,33 kilogram untuk dijual dalam bazar setiap 5 harinya (Mong, 2007). Sebagai etnis yang terpencil jauh dari hiruk pikuk modernisasi di pusat, bagi mereka, uang dari penjualan opium tersebut dipergunakan untuk membeli 2 barang terpenting yakni beras dan nasi (Sai 2004 dalam Mong, 2007).

Pemerintah Myanmar mengalami pergolakan yang cukup hebat mengenai opium. Karena tidak dapat dipungkiri, opium merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Myanmar yang berada di negara bagian Shan tersebut, terlebih lagi bukan rahasia jika pemerintah turut campur tangan terhadap eksistensi opium tersebut dengan cenderung mengambil garis lunak dan memberi otonomi bagi etnis Wa yang dikenal sebagai produsen utama amphetamine (Cipto, 2017). Selain itu, keberadaan amphetamine tidak hanya menguntungkan bagi produsen, tetapi juga aktor-aktor didalamnya seperti beberapa anggota militer Myanmar yang sejak tahun 1980 akhir telah menggunakan opium sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan negara (Meehan, 2016).. Pendanaan opium tersebut bukanlah bersifat langsung, tetapi berasal dari pajak-pajak yang dikenakan pada petani maupun kurir atau pembeli.

Mayoritas produk opium tersebut diekspor ke China, Thailand dan India yang menyebabkan adanya krisis stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Terdapat total 3 jalur persebaran narkotika tersebut, yakni melalui Thailand, Yunnan yang kemudian menuju macao dan Vietnam yang kemudian menuju Philipina (Cipto, 2017). ASEAN sebagai organisasi yang menaungi sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara pun menempatkan isu ini dalam deretan isu yang perlu penindaklanjutan segera. Dibuktikan dengan adanya program *Drug Free ASEAN* 2015 yang telah jauh hari dicanangkan sejak tahun 1998 (UNODC for East Asia and the Pacific, 2008). Program tersebut pada awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 bersama dengan UNODC kawasan Asia Timur dan Pasifik. Namun mengingat permasalahan narkotika yang terus bertambah buruk setiap tahunnya,

realisasi tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 (UNODC for East Asia and the Pacific, 2008). Terlebih apa yang dilakukan dalam kawasan *Golden Triangle*, khususnya etnis WA ini erat kaitannya dengan kemunculan laporan-laporan baik dari media masa maupun organisasi yang menyebutkan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu pusat dari produksi obat-obatan terlarang yang tersebar di dunia selama ini (Moodley, 2015). Tentu hal ini menjadi bantuan yang sangat diterima Myanmar untuk memberantas perdagangan opium hingga ke akar-akarnya.

Menanggapi berbagai permasalahan etnis yang terjadi, termasuk kekuatan UWSA, Pemerintah Myanmar pun tidak berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya solutif. Pada tahun 2011, pemerintah Myanmar mengeluarkan NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) yang diharapkan akan menjadi langkah terakhir untuk penyelesaian konflik etnis yang terjadi. Etnis yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut cenderung lebih banyak dibanding dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Tetapi tetap saja belum membuahkan hasil yang berarti karena beberapa etnis minoritas yang memiliki kedudukan tinggi menolak untuk menandatangani NCA. Namun, penolakan penandatanganan tersebut tidak menghalangi usaha Myanmar untuk berproses sedikit demi sedikit mengurangi gejolak konflik yang ada. Pemerintah Myanmar melanjutkan tahap kedua NCA dengan mengadakan konferensi Panglong. Hingga pertengahan tahun 2017 ini, konferensi Panglong masih mencapai tahap pertemuan yang kedua sehingga belum terlihat hasilnya.